

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chomzah, Ali. *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II- Sertifikat dan Permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2002.
- Effendie, Bahtiar. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni. 2008.
- Goenawan, Kian. *Panduan Mengurus Izin Tanah & Properti*. Yogyakarta: Pustaka Grahatama. 2008.
- Guntur, I Gsti Nyoman. *Pendaftaran Tanah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 2014.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan. 2008.
- . *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan. 2008.
- Hutagalung, Arie S. *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia. 2002.
- . *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia. 2005.
- Lubis, Abd. Rahim dan Mhd. Yamin. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Mandar Maju. 2008.
- . *Hukum Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan*. Bandung: Mandar Maju. 2010.
- . *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju. 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Dan Politik Agraria*. Jakarta: Karunika-Universitas Terbuka. 1988.

- Parlindungan, AP. *Pendaftaran Tanah dan Konfersi hak milik atas tanah menurut UUPA*. Bandung: Alumni. 1988.
- . *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju. 1990.
- Peranginangin, Effendi. *Hukum Agraria I*. Jakarta: FH Universitas Indonesia. 1979.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Salindeho, John. *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1999.
- Silviana, Ana. *Teori Dan Praktek Pendaftaran Tanah*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2006.
- . *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- . *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arloka Surabaya. 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sutedi, Adrian. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*. Jakarta: BP Citra Jaya. 2006.
- . *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- . *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Usman, H. Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press. 1999.
- Wahid, Muchtar. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah: Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis.* Jakarta: Republika. 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Kamus

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Eight Edition. 2004.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Karya Ilmiah

Tiku, Trigita. “*Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah di Kota Makassar*”, Skripsi, Universitas Hasanuddin. Makassar. 2015.

Kirana, Margaretha Dewi. “*Sertifikat Ganda Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 156/K/TUN/2005*”, Tesis, Universitas Indonesia, Depok. 2012.

Dewi, Inneke Kusuma. “*Notulen Rapat Sebagai Dasar Pemutusan Perjanjian Sepihak Pemberian Jasa-Jasa Pengangkutan Darat Antara PT Haseda Remindo Dengan PT Caltex Pacific Indonesia*”, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok. 2011.

Jurnal

Mezak, Meray. “*Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*”. *Law Review* Falkutas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. V No. 3. 2006.

Eman, Angga. “*Penyelesaian Terhadap Sertifikat Ganda oleh Badan Pertanahan Nasional*”. *Lex et Societatis*. Vol.I No. 5. 2013.

Internet

“BPN Pontianak”, <http://bpnpontianak.com/index.php/formmaker/15>.

“Badan Pusat Statistik Kota Pontianak”, <https://pontianakkota.bps.go.id/>.

“BAPPEDA Kota Pontianak”, <http://bappeda.pontianakkota.go.id/>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/risalah>.

“BPN Kalbar: Ribuan Sertifikat Tumpang Tindih”, <http://www.antarakalbar.com/berita/301671/bpn-kalbar-ribuan-sertifikat-tumpang-tindih>.

“BPN: Tumpang Tindih Lahan di Kalbar Tinggi”, <http://www.antaraneews.com/berita/469891/bpn-tumpang-tindih-lahan-di-kalbar-tinggi>.

Koran

“Pontianak Mulai Bangun Rusun”,
<http://properti.kompas.com/read/2015/03/21/234709721/Pontianak.Mulai.Bangun.Rusun>.

Wawancara

Aswin selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah & Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 11 Oktober 2017.

Rian Har Edy Santoso, SE selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 12 Oktober 2017.

